

PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN PADA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO.

Saprudin¹

Zubaidah Rahman²

E-mail. saprudin545@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

ABSTRAK: The purpose of this research is 1) to analyze the influence of good governance implementation to the quality of financial information on the department of finance Gorontalo Province, 2) to analyze the influence of Governmental Accounting Standards to the quality of financial information on the Department of Finance Gorontalo Province. The type of this research is quantitative descriptive. The characteristic of this research is explanatory research. The population in this research amounted to 100 people. This research uses the Stratified Random Sampling method by doing data homogeneity according to the groups of fields in the Department of Finance Gorontalo Province. Data collection techniques were carried out by interview, a list of questions. The data analysis method used is Multiple Regression with SPSS program. The results of the research show that Good Governance has a positive effect, however not significant to the quality of financial information. Besides, for Governmental Accounting Standards have a positive and significant effect on the quality of financial information. The result of coefficient of determination test show that the quality of financial information in Department of Finance Gorontalo Province influenced by good governance variables and Governmental Accounting Standards of 52.9% and the remaining 47.1% influenced by other variables which have not been studied in this research among others human Resources, internal control, and technology utilization. For good governance variables to be paid more attention, especially for community participation in this case still lacking, therefore it will have an impact on the quality of financial information because, with a good implementation of good governance, it will produce good quality financial information for government agencies. For Governmental Accounting Standards variables. For government accounting standards variables must be considered, especially on the application of the accrual basis due to the application of the accrual basis recently implemented since 2015. Therefore, the staff's readiness is indispensable in order to produce good quality financial information.

Keyword: Good Governance, governmental accounting standards, quality financial information.

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah 1). untuk Menganalisis pengaruh penerapan good governance terhadap kualitas informasi keuangan pada badan keuangan provinsi gorontalo, 2). Menganalisis Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan pada badan keuangan provinsi gorontalo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian menjelaskan (explanatory). Populasi pada penelitian ini berjumlah 100 orang. Penelitian ini menggunakan metode *Stratified Random Sampling* (sampel acak berstrata) dengan melakukan Homogenitas data menurut kelompok bidang-bidang yang ada di Badan Keuangan Provinsi Gorontalo. Teknik

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan,. Metode analisis data yang digunakan adalah Regresi Berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa good governance berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan selain itu untuk standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan yang ada pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo dipengaruhi oleh variabel good governance dan standar akuntansi pemerintahan sebesar 52,9% dan sisanya 47,1% dipengaruhi variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini antara lain sumber daya manusia, pengendalian intern, dan pemanfaatan teknologi. Untuk variabel *good governance* agar lebih diperhatikan lagi, khususnya untuk partisipasi masyarakat dalam hal ini masih kurang sehingga akan berdampak pada kualitas informasi keuangan karena dengan adanya penerapan good governance yang baik maka akan menghasilkan kualitas informasi keuangan yang baik bagi instansi pemerintahan. Untuk variabel standar akuntansi pemerintahan harus diperhatikan, khususnya pada penerapan basis akrual karena untuk penerapan basis akrual baru diterapkan sejak tahun 2015. Sehingga kesiapan para staf sangat diperlukan demi menghasilkan kualitas informasi keuangan yang baik.

Kata kunci : Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Informasi Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan acuan dasar dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, sehingga terciptanya pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun daerah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah Sehingga dalam pemerintahan daerah harus mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) guna untuk pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya good governance Maka dari itu, pemahaman aparatatur atas penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah, Untuk mencapai tujuan tersebut, maka informasi dalam laporan keuangan harus mempunyai karakteristik kualitatif meliputi relevan, andal, dapat diperbandingkan dan dapat dipahami. Khusus untuk karakteristik kualitaitif relevan, sebuah informasi dalam laporan keuangan pemerintah dinyatakan memiliki nilai relevan jika informasi tersebut memenuhi empat kriteria, antara lain nilai umpan balik (*feedback value*), manfaat prediktif (*predictive value*), tepat waktu (*timelines*) dan lengkap (*completeness*). Keterlambatan penyampaian laporan keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut disebabkan adanya kendala dibeberapa sector, yaitu Dokumentasi dan sinergitas sehingga berdampak pada kualitas informasi keuangan. Hal ini harus relevan dimana informasi yang relevan itu berisi (1) Manfaat umpan balik, (2) Memiliki manfaat predikif, (3) Tepat Waktu, (4) Lengkap.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menarik sebuah rumusan masalah yakni

- a) Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
- b) Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?
- c) Apakah penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan?

TINJAUAN PUSTAKA

Good Governance

Bersatu dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang baik atau amanah (*good governance*) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk memenuhi aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilakukan berbagai upaya yaitu dengan ditetapkannya Tap. MPR RI No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Elvira, 2011 : 54).

Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut Azlim, dkk (2012 : 4) yang dikutip dari Summodiningrat (1999) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintah yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan Menurut Mardiasmo (2004 : 23) Bank memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Sedangkan *United Nation Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara.

Berdasarkan pengertian *Good Governance* oleh Mardiasmo dan Bank Dunia yang disebutkan di atas dan sejalan dengan tuntutan reformasi yang berkaitan dengan aparatur pemerintah daerah adalah perlunya mewujudkan administrasi daerah yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maka menuntut penggunaan konsep *good governance* sebagai pemerintahan yang baik relevan dan berhubungan satu dengan lainnya.

Menurut Elvira (2011 : 54) tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan lainnya dalam mewujudkan *good governace* adalah

- a) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam manajemen pemerintah, lingkungan, ekonomi dan sosial
- b) Partisipasi, yaitu penerapan pengambilan keputusan yang demokratis serta pengakuan atas HAM, kebebasan pers dan kebebasan mengemukakan pendapat atau aspirasi masyarakat

- c) Akuntabilitas, yaitu kewajiban melaporkan dan menjawab dari yang dititipi amanah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan maupun kegagalan kepada penitip amanah sampai yang memberi amanah puas dan bila belum ada atau tidak puas dapat kena sanksi.

Menurut *United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) dalam Elvira (2011 : 54) karakteristik dalam mewujudkan *good governance* dalam pemerintahan daerah terdiri dari :

- a) *Transparency* (Transparansi), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- b) *Accountability* (Akuntabilitas), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- c) *Participation* (Partisipasi), keterlibatan pegawai dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- d) *Rule of law* (Penerapan Hukum), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- e) *Effectiveness* (Efektivitas), suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektifitasnya.

Keberhasilan penerapan *Good Governance* dan kualitas informasi laporan keuangan daerah dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik kualitatif merupakan ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Menurut Mahmudi (2010:19) kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi pemerintah daerah yang diterapkan.

Menurut Elvira (2011 : 56) yang dikutip dari Sunarto (2003) *good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi (keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi, keadilan, dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

Implementasi *good governance* dapat dilihat melalui laporan keuangan yang berkualitas. Semakin tinggi tingkat implementasi *good governance*, semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan yang diterbitkan. Laporan keuangan yang berkualitas dinilai dengan menjawab pertanyaan seberapa besarkah angka – angka dalam laporan keuangan dapat dipertanggungjawabkan.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Undang-undang Keuangan Negara telah mengantisipasi perubahan standar akuntansi dilingkungan pemerintahan yang mengacu kepada perkembangan standar akuntansi dilingkungan pemerintahan secara internasional. Pada pasal 32 UU No.17 Tahun 2003 menyatakan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan selanjutnya pada pasal 57 UU No.1 tentang Perbendaharaan menyatakan dalam rangka

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan dibentuk komite standar akuntansi pemerintahan (Darise, 2008 : 4).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 Ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (susiana, 2016 : 9).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu standar komite yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Standar akuntansi pemerintahan merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai.

Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut Susiana (2016 : 9) yang dikutip dari Sinaga (2005) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengguna laporan keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan eksternal auditor (BPK) akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit.

Menurut Susiana (2016 : 10) yang dikutip dari Wijaya (2008) “Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar akuntansi pertama di Indonesia yang mengatur mengenai akuntansi pemerintahan Indonesia. Sehingga dengan adanya standar ini, maka laporan keuangan pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel”.

Menurut Nugraeni dan Budiantara (2015 : 22) Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terdiri dari:

- a) Kerangka konseptual akuntansi
- b) PSAP No.01 tentang penyajian laporan keuangan
- c) PSAP No.02 tentang laporan realisasi anggaran
- d) PSAP No.03 tentang laporan arus kas
- e) PSAP No.04 tentang catatan atas laporan keuangan

- f) PSAP No.05 tentang akuntansi persediaan
- g) PSAP No.06 tentang akuntansi investasi
- h) PSAP No.07 tentang akuntansi aset tetap
- i) PSAP No.08 tentang akuntansi kontruksi dalam pengerjaan
- j) PSAP No.09 tentang akuntansi kewajiban
- k) PSAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan operasi yang tidak dilanjutkan
- l) PSAP No.11 tentang laporan keuangan konsolidasi
- m) PSAP No.12 tentang laporan operasional

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintah dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. KSAP adalah komite yang dibentuk dalam rangka mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip - prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan tugas Sehari - hari KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Keuangan. KSAP itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan termasuk untuk mendukung penerapan standar tersebut (Yuliyanti, 2015 : 7)

Menurut Darkasyi (2015) PP SAP akan digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah berupa:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas, dan
4. Catatan atas Laporan Keuangan

Dengan adanya SAP maka laporan keuangan pemerintah pusat/daerah akan lebih berkualitas (dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan) dan laporan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh BPK untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan, sebelum disampaikan kepada para *stakeholder* antara lain: pemerintah (eksekutif), DPE/DPRD (legislatif), investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (Darkasyi, 2015).

Menurut Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2004 paragraf lima tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2005:34) pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Darkasyie, 2015).

Menurut PP No.71 Tahun 2010 terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan dimana maksud dari karakteristik kualitatif keuangan adalah ukuran-ukurnormatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

- a) Relevan
Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.
- b) Andal
Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
- c) Dapat dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.
- d) Dapat dipahami.
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Adapun yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, perioditas, konsistensi, pengungkapan lengkap, dan penyajian wajar (Nurlaila dkk, 2014 : 27).

a) Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan - LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

b) Konsistensi (*Consistency*)

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

c) Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

d) Penyajian Wajar (*Fair Presentation*)

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

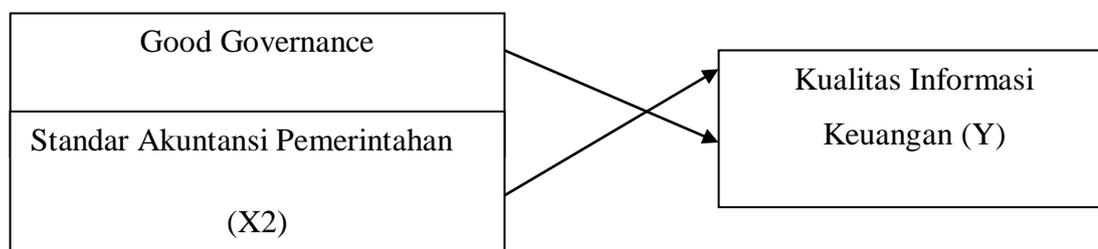
e) Periodisitas (*Periodicity*)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode - periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

I. Kerangka Konseptual



Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian maka peneliti mengembangkan kerangka penelitian ini yang diuji secara simultan dan parsial yaitu Kualitas Informasi keuangan (Y) diperkirakan baik secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh variabel independen yaitu *Good Governance* (X1), Standar Akuntansi Pemerintah (X2).

Pengertian *Good Governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Menurut Azlim, dkk (2012 : 4) (Summodiningrat, 1999) menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintah yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dengan adanya implementasi *good governance* dalam pemerintahan daerah maka kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan akan semakin baik. Dimana penelitian Mia Oktarina dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan *Good Governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.

Adapun yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan "Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip - prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah". Hal ini bersifat wajib baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna dalam peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah. Dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan ini akan maka kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan akan relevan. Adapun penelitian Nurlaila dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten enrekang menyatakan hasil penelitiannya bahwa efektivitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, suatu entitas harus memenuhi prasyarat yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk laporan keuangan pada umumnya terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini dikembangkan dari telaah teoritis dan peneliti terdahulu sebagai jawaban sementara dari masalah atau pertanyaan yang memerlukan pengujian. Dengan demikian dikemukakan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- a) Penerapan *good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan
- b) Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan
- c) Penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan bersama-sama berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang terlibat langsung dalam dinas keuangan dan asset daerah, jumlah pegawai Badan Keuangan Provinsi Gorontalo berjumlah 100 orang dimana jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan pegawai yang ada pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data menggunakan *software SPSS (Statistical Package for Social Science)*

- a. Metode Kualitatif, Yaitu Penjabaran atau pendeskriptifan tentang variabel yang diangkat yaitu *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan.
- b. Metode Kuantitatif, Yaitu untuk menganalisa pengaruh penerapan *good governance*, standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan dengan menggunakan persamaan regresi berganda (Sumarsono : 257) dengan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan :

Y	:	Kualitas informasi keuangan
b ₁ ,b ₂	:	Koefisien regresi
X ₁	:	<i>Good governance</i>
X ₂	:	Standar akuntansi pemerintahan

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji Validitas penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah pertanyaan / pernyataan pada kuisioner yang telah diedarkan dapat mengukur variabel yang

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

akan diukur. Untuk mengetahui validitas pertanyaan / pernyataan dari setiap variabel, maka digunakan *correlation bivariate* dengan kriteria :

Jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (0,256), maka butir pernyataan kuisioner dinyatakan valid.

Jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ (0,256), maka butir pernyataan kuisioner dinyatakan tidak valid.

a. *Good Governance*

Tabel 5.25 Hasil Uji Validitas *Good Governance*

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,630	0,256	Valid
2	0,716	0,256	Valid
3	0,514	0,256	Valid
4	0,668	0,256	Valid
5	0,695	0,256	Valid

Data olahan 2017

Berdasarkan tabel uji validitas variabel *good governance* (X1), dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai $r \text{ hitung}$ pada kolom total untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada setiap variabel $> 0,256$ hal ini sesuai dengan kriterianya jika $r \text{ hitung} > 0,256$ maka pertanyaan dikatakan valid.

b. Standar Akuntansi Pemerintahan

Tabel 5.26 Hasil Uji Validitas Standar Akuntansi Pemerintahan

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,769	0,256	Valid
2	0,730	0,256	Valid
3	0,810	0,256	Valid
4	0,753	0,256	Valid
5	0,735	0,256	Valid

Berdasarkan tabel uji validitas variabel standar akuntansi pemerintahan (X2), dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai $r \text{ hitung}$ pada kolom total untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada setiap variabel $> 0,256$ hal ini sesuai dengan kriterianya jika $r \text{ hitung} > 0,256$ maka pertanyaan dikatakan valid.

c. Kualitas Informasi Keuangan

Tabel 5.27 Hasil Uji Validitas Kualitas Informasi keuangan

Pertanyaan	R hitung	R tabel	Keterangan
1	0,827	0,256	Valid
2	0,790	0,256	Valid
3	0,707	0,256	Valid
4	0,760	0,256	Valid

Data olahan 2017.

Berdasarkan tabel uji validitas variabel kualitas informasi keuangan (Y), dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan untuk masing-masing variabel dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat dari nilai $r \text{ hitung}$ pada kolom total untuk setiap

pertanyaan/pernyataan pada setiap variabel $> 0,256$ hal ini sesuai dengan kriterianya jika r hitung $> 0,256$ maka pertanyaan dikatakan valid.

Sesuai dengan tujuan dilakukan uji validitas adalah untuk melihat seberapa besar kemampuan pertanyaan/pernyataan dapat mengetahui jawaban responden. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan/pernyataan yang diajukan oleh peneliti dalam kuisisioner yang dibagikan kepada responden, dapat dijadikan sebagai alat ukur yang tepat.

Uji Reliabilitas

Uji reabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode *Alpha Cronbach*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai *alpha* $> 0,60$.

Tabel 5.28 Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Hasil uji reliabilitas	Cronbach alpha	Ket
<i>Good Governance</i>	0.647	0.600	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintahan	0.809	0.600	Reliabel
Kualitas Informasi Keuangan	0.774	0.600	Reliabel

Data olahan 2017

Tabel diatas menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* yang berfungsi untuk menguji reliabilitas dari pertanyaan dari tiap variabel yang diajukan peneliti. Terlihat bahwa hasil perhitungan nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$ yang menunjukkan semua pertanyaan reliable.

Uji Persyaratan Analisis

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak uji normalitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogrov – Smirnov. Kriteria pengujian satu sampel menggunakan pengujian satu sisi yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu :

1. Nilai signifikansi atau probabilitas $< 0,05$ maka distribusi data tidak normal
2. Nilai signifikansi atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data normal dapat dilihat dari tabel diatas nilai signifikan sebesar 0,292 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Hal ini sesuai kriteria jika nilai signifikan atau probabilitas $> 0,05$ maka distribusi data adalah normal.

Tabel 5.29 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.95375108
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.100
Kolmogorov-Smirnov Z		.980
Asymp. Sig. (2-tailed)		.292

Sumber : Output SPSS 21,0, 2017

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji, apakah ditemukan atau tidak korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi antara variabel independen maka akan ditemukan adanya masalah multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik harus tidak menimbulkan masalah multikolinearitas terhadap setiap variabel bebas yaitu dengan :

1. Melihat angka collinearity statistics yang ditunjukkan oleh nilai variance inflation factor (VIF). Jika $VIF < 10$, variabel bebas yang ada tidak memiliki masalah multikolinearitas (santoso, 2002).
2. Melihat tollerance pada output penilaian multikolinearitas yang menunjukkan nilai tollerance $> 0,10$ akan memberikan kenyataan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 5.30 Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	(Constant)			
	X1	0,651	1.536	Bebas Multikolinieritas
	X2	0,651	1.536	Bebas Multikolinieritas

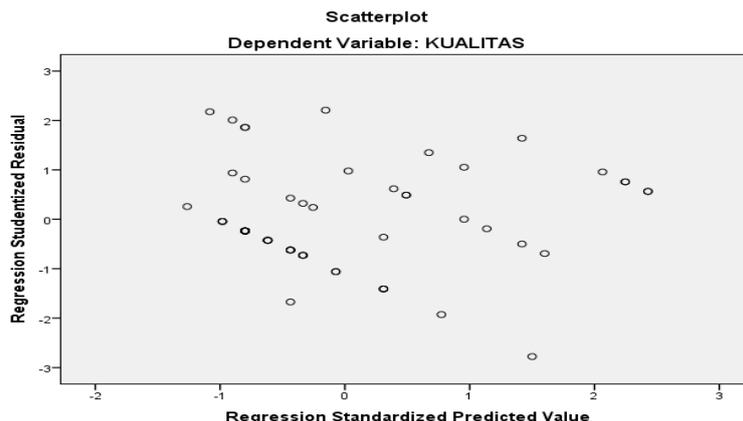
Sumber: Output SPSS 21.0 for Windows berdasarkan data penelitian,2017

Berasarkan dari tabel diatas, model regresi yang diajukan untuk variabel independen semuanya terbebas dari multikolinearitas ini terlihat dari hasil pengolahan data yang menunjukkan variabel independen memiliki nilai $VIF < 10$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas informasi keuangan.

Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan uji glesjer yaitu dengan melihat nilai signifikan $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 5.1 :Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Sumber : Data Olahan SPSS 21.0, 2017

Berdasarkan diagram scatterplot diatas, data tersebar secara acak tanpa membentuk suatu pola tertentu titik menyebar keatas dan dibawah pada nolsumbu Y, ini membuktikan ini tidak terjadi hetroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini terdapat perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu persamaan regresi berganda.

Tabel 5.31 Koefisien Regresi dan Uji Signifikansi Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	3.175	1.850	
1 X1	.184	.100	.207
X2	.469	.090	.585

Sumber: Output SPSS 21.0 for Windows berdasarkan data penelitian, 2017

Dari tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :

$$Y = 3.175 + 0.184X_1 + 0.469X_2$$

Dalam persamaan regresi diatas, konstanta (β_0) adalah sebesar 3.175 hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel *good governance* (X1) dan standar akuntansi pemerintahan (X2) yang mempengaruhi, kualitas informasi keuangan yang terjadi pada provinsi gorontalo sebesar 3.175. sedangkan hasil uji regresi berganda untuk variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

1. Nilai koefisien *Good Governance* (X1) sebesar 0,184 berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan *good governance* satu satuan maka variabel kualitas informasi keuangan daerah naik sebesar 0,184 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
2. Nilai koefisien Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) sebesar 0,469 berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan (Y). Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan standar akuntansi pemerintahan satu satuan maka variabel kualitas informasi keuangan daerah naik sebesar 0,469 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

Pengujian Hipotesis

1. Koefisien determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi dilakukan untuk melihat seberapa besar presentase pengaruh variabel *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan.

Tabel 5.32 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi (R^2)

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.727(a)	0.529	0.512	0.970

Sumber: Output SPSS 21.0 for Windows berdasarkan data penelitian

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka R (koefisien korelasi) sebesar 0,727. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sedang antara *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai R *square* yang diperoleh sebesar 0,529 yang menunjukkan bahwa kualitas informasi keuangan yang ada pada provinsi gorontalo dipengaruhi oleh variabel *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan sebesar 52,9% dan sisanya 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini. Adapun variabel lainnya antara lain yaitu sumber daya manusia, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi.

Uji T

Pengujian secara parsial (uji t) dilakukan untuk menentukan apakah variabel *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan secara parsial.

Tabel 5.33 : Uji T Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	3.175	1.850		1.716	.092
X1	.184	.100	.207	1.839	.071
X2	.469	.090	.585	5.196	.000

Sumber: Output SPSS 21.

Dari tabel diatas menunjukkan hasil uji t adalah :

1. T hitung (X_1) terhadap (Y) sebesar (1.839) sedangkan nilai t tabel $dk = n-k-1$ ($60-2-1=57$) adalah sebesar (1.672) yang artinya t hitung lebih besar dari t tabel. Selain itu dilihat dari hasil nilai signifikansi yang diperoleh sebesar (0.071) lebih besar dari nilai signifikansi (0,05) maka dapat disimpulkan H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan.
2. T hitung (X_2) terhadap (Y) sebesar (5.196) sedangkan nilai t tabel $dk = n-k-1$ ($60-2-1=57$) adalah sebesar (1.672) yang artinya t hitung lebih besar dari t tabel. Selain itu dilihat dari hasil nilai signifikansi yang diperoleh sebesar (0.000) lebih kecil dari nilai signifikansi (0,05) maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_2 diterima. Hal ini membuktikan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan.

Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan secara bersama-sama.

**Tabel 5.34 Uji f
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	60.265	2	30.132	32.003	.000 ^b
Residual	53.669	57	.942		
Total	113.933	59			

Sumber: Output SPSS 21.0

Berdasarkan tabel diatas hasil uji ANOVA (*Analysis of variance*) diperoleh nilai F hitung (32.003) sedangkan nilai F tabel (3,159) yang artinya nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel sehingga terbukti bahwa variabel X_1 dan X_2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dimana H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama terhadap kualitas informasi keuangan (Y).

Selanjutnya dilihat dari hasil nilai signifikan yang diperoleh sebesar (0,000) lebih kecil dari nilai (0,05) artinya model regresi yang digunakan layak uji, hal ini membuktikan semakin baik penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama maka akan semakin baik kualitas informasi keuangan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan antara *good governance* sebagai (X_1) terhadap kualitas informasi keuangan (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar 1,839 dengan nilai signifikan sebesar 0,071 > 0,05 yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas informasi

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

keuangan. Berbeda dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan.

Untuk melihat besarnya pengaruh *good governance* secara parsial terhadap kualitas informasi keuangan dapat dihitung dari nilai koefisien regresi parsial pada Tabel 5.33 sebesar 0,184. Jadi secara parsial *good governance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 0,184. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan *good governance* akan menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan yang semakin baik pula (Manupan, 2015). Adapun ketidak signifikannya *good governance* terhadap kualitas informasi keuangan disebabkan karena didalam *good governance* terdapat beberapa indikator, diantaranya transparansi (keterbukaan) untuk transparansi laporan keuangan pada kantor Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, sudah disajikan melalui website dan surat kabar, ini sudah menjadi kewajiban kantor Badan Keuangan Provinsi Gorontalo untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat maupun pemerintah, adapun indikator lainnya yaitu partisipasi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah partisipasi masyarakat yang masih kurang. Karena partisipasi yang terjadi hanyalah partisipasi antara para staf dan juga bagian keuangan untuk partisipasi masyarakat dalam hal laporan keuangan masih kurang. Beberapa indikator tersebut sudah menjadi keharusan dalam penyajian laporan keuangan, sehingga untuk *good governance* ini berpengaruh tetapi tidak secara signifikan terhadap kualitas informasi keuangan Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Maryani (2016) dalam penelitiannya tentang pengaruh *good governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bintang, dimana dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu untuk pengendalian internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Elvira (2011) dengan penelitiannya tentang pengaruh penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan menunjukkan hasil yang sama dimana untuk variabel *good governance* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan ini karenakan nilai signifikannya sebesar 0,324 sehingga tidak signifikan. Sedangkan untuk standar akuntansi pemerintahan menunjukkan hasil yang sama juga dimana standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Adapun dalam penelitian Mia Oktarina, dkk (2016) dengan penelitiannya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang menunjukkan hasil yang sama dimana penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan untuk kualitas aparatur pemerintah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, selain itu untuk penerapan *good governance* dalam penelitian ini tidak sejalan karena dalam penelitian ini *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan.

Berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan antara standar akuntansi pemerintahan sebagai (X_2) terhadap kualitas informasi keuangan (Y) menunjukkan bahwa t hitung sebesar 5.196 dengan nilai signifikan sebesar ($0,000 < 0,05$) menunjukkan

bahwa variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan. Hasil uji hipotesis ini sama dengan hipotesis sebelumnya yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan.

Untuk melihat besarnya penerapan standar akuntansi pemerintahan secara parsial terhadap kualitas informasi keuangan dapat dihitung dari nilai koefisien regresi parsial pada Tabel 5.33 sebesar 0,585. Jadi secara parsial standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo sebesar 0,469. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ada pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, maka akan semakin baik kualitas informasi keuangan. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Huzni (2013) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah, selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2008) dengan judul Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Selain itu dalam penelitian Nurlaila (2014) dengan penelitiannya efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten enrekang menunjukkan hasil yang sama dimana efektifitas standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah naik.

Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Berdasarkan hasil uji simultan yang telah dilakukan antara *good governance* x1 dan standar akuntansi pemerintahan x2 terhadap kualitas informasi keuangan sebagai variabel Y menunjukkan bahwa f hitung sebesar 32,003 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan pemerintah. Hasil penelitian ini dapat menjawab hipotesis yang telah diajukan oleh peneliti bahwa *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Hal tersebut juga ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi yang cukup tinggi, yaitu dengan nilai R square sebesar 0,529. Yang memperlihatkan bahwa 52,9% kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan. Sedangkan sisanya 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Adapun variabel lainnya itu antara lain sumber daya manusia, pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Informasi Keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Maryani (2016) yang menunjukkan bahwa *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas laporan Keuangan dan penelitian yang dilakukan oleh Huzni (2013) dengan hasil penelitiannya menunjukkan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi keuangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian secara parsial (Uji T), menunjukkan bahwa variabel *good governance* (X1) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan (Y), dan variabel standar akuntansi pemerintahan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan (Y) pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
2. Berdasarkan pengujian secara simultan (Uji F), menunjukkan bahwa penerapan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi keuangan pada Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
3. Berdasarkan hasil uji regresi berganda, menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas informasi keuangan, dan variabel standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi keuangan.
4. Berdasarkan nilai koefisien determinasi atau *R square* sebesar 0,529. Hal ini menunjukkan bahwa 52,9% kualitas informasi keuangan dipengaruhi oleh variabel *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azlim, 2012, Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kualitas Informasi Keuangan di SKPD Kota Banda Aceh. *Jurnal*.
- Darise Nurlan, 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi II. Jakarta :Harvarindo
- Hasanati Dian, 2016. Pengaruh Kompetensi dan Integrits Terhadap Kualitas Audit Inspektorat Provinsi Gorontalo. *Penelitian tidak di publikasikan*
- Laboro Herson, 2016. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. *Penelitian tidak di publikasikan*
- Mursyidi, 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Mardiasmo, 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi
- Mustafa, Anis Iqbal, 2012. Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Penelitian tidak di publikasikan*
- Maryani Novita, 2016. Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan. *Penelitian tidak di publikasikan*
- Manupan, 2015. Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pada SKPD Kota Dumai. *Jurnal*.

- Nugraheni Purwaniati, 2008, Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. *Jurnal*.
- Nurlaila, 2014, Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada SKPD di Kecamatan Enrekang). *Penelitian tidak di publikasikan*
- Nugraeni, 2015, Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja di SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal*.
- Oktarina Mia, dkk. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Jurnal*.
- Sujawerni Wiratna, 2014. SPSS Untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Tahir Huzni, 2012. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di SKPD Kabupaten Gorontalo. *Jurnal*.
- Tanjung Abdul, 2014. Akuntansi Pemerintahan daerah Berbasis Akual. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Zeyn Elvira, 2009, Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan di SKPD Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal*.

Sumber Lainnya :

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Kinerja Dinas Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Gorontalo tentang LAKIP tahun 2015.